

## ABSTRAK SKRIPSI

Akhir-akhir ini semakin banyak kasus kecurangan yang terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal badan usaha. Dengan sistem pengendalian internal yang lemah, pihak yang ada dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kecurangan. Untuk dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi di dalam badan usaha maka dapat digunakan *fraud auditing*. *Fraud auditing* memang masih tergolong baru. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya kejahatan administrasi (*white-collar crime*) *fraud auditing* semakin populer.

Keberadaan *fraud auditing* sebagai salah satu bentuk *special audit* menjelaskan cara-cara untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam siklus pembelian dan pembayaran utang, kecurangan yang terjadi dikategorikan menjadi tiga yaitu: (1) *False expense report*, terjadi bila yang dicatat sebagai biaya adalah *non business item, inflated items, fictitious items*, dan *duplicate items*; (2) *False supplier invoice* jika tidak ada barang/jasa yang diterima, jumlah yang tercantum pada faktur lebih tinggi dari sebenarnya, dan kualitasnya telah dikompromikan; (3) *False information* yang mengakibatkan kerugian badan usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa badan usaha belum memiliki struktur organisasi yang memadai, ditunjukkan dengan adanya perangkapan fungsi secara vertikal yaitu fungsi penyimpanan barang dan pengawasan sehingga tidak ada *internal check* atas penerimaan barang. Kondisi ini didukung dengan sistem otorisasi yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya pada transaksi pembelian, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari bagian kasir mengenai penggunaan kas kecil. Selain itu praktik yang sehat dalam pengelolaan dokumen juga belum terlaksana, meliputi perancangan dokumen *Purchase Order* yang memungkinkan bagian gudang mengetahui informasi harga dan Bukti Kas/Bank Keluar tidak dicap "lunas" setelah giro dibayar, turut berperan memberikan peluang terhadap terjadinya kecurangan.

Akibat adanya perangkapan fungsi, badan usaha mengalami kerugian yakni: sebesar Rp 890.580,- akibat perbedaan kualitas bahan baku; selisih harga karena memilih pemasok yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 16.428.123,- ; pelanggaran ketentuan batas maksimum pengeluaran dengan kas kecil sebesar Rp 4.693.650,- ; dan kerugian akibat pembayaran ganda atas satu faktur yang sama sebesar Rp 42.243.575,-. Rekomendasi yang disarankan dapat dijadikan pertimbangan manajemen untuk mencegah kerugian lebih besar.